

## PELAYANAN KERJA SAMA STASIUN BUMI PENGINDERAAN JAUH (SBPJ-BRIN) PAREPARE DALAM TRANSISI ORGANISASI BRIN

Muhammad Yunus Patawari, Wilma Istikasari

BHKS-BRIN Kawasan Parepare  
yunuspatawari7@gmail.com

Page | 75

### Abstrak

Dunia riset nasional kini tengah berbenah dengan melebur lembaga riset dibawah pemerintah/kementerian seperti LIPI, BATAN, BPPT, LAPAN menjadi satu organisasi riset BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dalam rangka reformasi birokrasi riset. Transformasi organisasi membawa Stasiun Bumi Penginderaan Jauh (SBPJ) di Parepare Sulawesi Selatan, yang sebelumnya merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis di LAPAN kini berubah status menjadi Stasiun Bumi kawasan BRIN Parepare. Terdapat empat unit satuan kerja di kawasan BRIN Parepare yang bertugas sebagai pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan stasiun bumi. Perubahan status tersebut membawa pengaruh signifikan terhadap semua pelayanan yang ada pada SBPJ-BRIN Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memberi gambaran objek dan pemecahan masalah merujuk pada periode waktu saat ini/terbaru. Dari hasil penelitian terdapat empat perubahan di SBPJ-BRIN Parepare yaitu perubahan (1) fungsi, (2) struktur, (3) personalia dan (4) proses bisnis. Perubahan ini berdampak pada distraksi tugas fungsi SBPJ dan distraksi fungsional pegawai. Meskipun perubahan yang dilakukan bersifat radikal dan fundamental, namun permintaan layanan dan kerja sama dari mitra internal dan eksternal BRIN tidak mengalami perubahan terutama pada mitra yang telah menjalankan kerja sama jangka panjang sebelum SBPJ bergabung dengan BRIN. Solusi temporer yang dilakukan adalah menerapkan *multi-tasking* pada pegawai yang ada, agar layanan dan kerja sama tetap berjalan di BRIN Parepare, meskipun bersifat sementara namun fungsi pelayanan dapat berjalan baik. Pada masa transisi ini diharapkan SBPJ-BRIN Parepare dapat lebih aktif mensosialisasikan proses bisnis kerja sama kepada para mitra dan masyarakat terdekat agar tidak terjadi misinformasi yang mengakibatkan proses kerja sama tidak berjalan efektif dan efisien, di lain sisi sosialisasi ini membutuhkan pegawai yang sesuai dengan tugas dan jabatannya sebagai bentuk profesionalisme dalam pelayanan.

Kata kunci; reformasi birokrasi, kerja sama, re-organisasi, e-layanan

### PENDAHULUAN

Stasiun Bumi Penginderaan Jarak Jauh (SBPJ) bertugas melaksanakan operasional teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh (inderaja) dalam rangka melaksanakan penerimaan, perekaman dan pengolahan data satelit penginderaan jauh sumber daya alam, lingkungan dan cuaca, serta distribusi dan pelayanan teknis pemanfaatan data satelit penginderaan jauh. Di bawah LAPAN, SPBJ Parepare merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh di bawah Kedeputian Penginderaan Jauh LAPAN.

Sejak tahun 2015, LAPAN telah melakukan reorganisasi menyeluruh mulai dari Eselon I sampai eselon IV termasuk UPT SBPJ Parepare. Hal ini tertuang pada Peraturan Kepala

LAPAN Nomor 18 Tahun 2015. Peraturan ini mengubah status UPT SBPJ/Balai Penginderaan Jauh menjadi Stasiun Bumi Penginderaan Jauh, namun perubahan struktur yang signifikan ini tidak terlalu mempengaruhi tupoksi yang ada sebelumnya (SBPJ BRIN, 2022). Reorganisasi di lingkungan LAPAN ini dapat dilihat sebagai fase peralihan sebelum bergabung dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Tahun 2019 sesuai Peraturan Presiden Nomor 74, BRIN dibentuk dalam rangka menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Kehadiran BRIN bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SBPJ BRIN, 2022).

Pembentukan BRIN yang merupakan gabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam Reformasi Birokrasi. BRIN sendiri merupakan bagian dari strategi reformasi menuju *good governance* dengan sistem perubahan dan pengembangan organisasi. Bentuk perubahan organisasi diwujudkan dengan melebur LIPI, BATAN, BPPT, LAPAN menjadi BRIN. Birokrasi di Indonesia pada umumnya memiliki desain struktur yang besar (*big structure*) dan menimbulkan beberapa permasalahan sehingga berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi pada aspek organisasi diarahkan pada struktur organisasi yang berkarakteristik tepat ukuran dan tepat (Habibi, 2020).

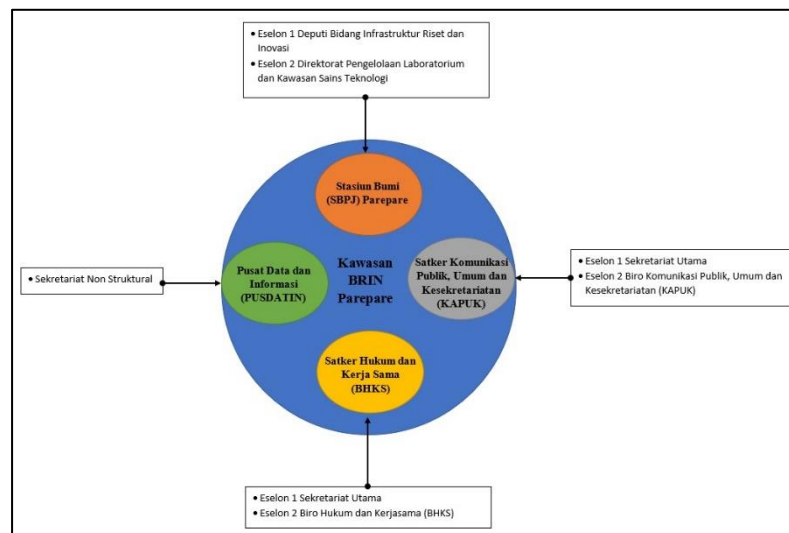
Kebijakan penataan organisasi pemerintah dalam rangka Reformasi Birokrasi saat ini diarahkan pada upaya *rightsizing*, yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional dan transparan, sehingga diharapkan organisasi tidak terlalu besar tetapi sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan memperkaya fungsi (Fitrianingrum et al., 2020).

Dalam Road Map reformasi birokrasi terdapat 8 agenda perubahan reformasi birokrasi yang diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian reformasi, yaitu; 1) manajemen perubahan, 2) deregulasi kebijakan, 3) penataan dan penguatan organisasi, 4) penataan tatalaksana, 5) penataan system manajemen SDM, 6) penguatan akuntabilitas, 7) penguatan pengawasan, 8) peningkatan kualitas pelayanan publik (Inspektorat Utama Kemenristek / BRIN, 2020).

Seperti halnya lembaga riset lain yang tergabung dalam BRIN, SPBJ Parepare melakukan pembenahan organisasi, tidak hanya untuk menyatukan visi dan misi namun juga menyamakan langkah dalam percepatan reformasi birokrasi itu sendiri. Salah satu agenda reformasi birokrasi adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diharapkan

mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan prima sesuai kebutuhan stakeholder.

Perubahan organisasi yang terjadi pasca bergabungnya SBPJ-LAPAN ke BRIN membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pelayanan umum terutama pada pelayanan kerja sama. Bergabungnya SBPJ-LAPAN ke BRIN secara fundamental organisasi SBPJ berubah menjadi kantor Kawasan BRIN Parepare dengan SBPJ sebagai salah satu layanan di dalamnya. Jika sebelumnya SBPJ Parepare merupakan satuan kerja (satker) tunggal, maka saat ini beberapa satuan kerja ditempatkan dalam Kawasan ini untuk mendukung tugas dan fungsi SBPJ, sehingga BRIN Kawasan Parepare ini lebih dikenal dengan sebutan Stasiun Bumi Penginderaan Jauh (SBPJ) BRIN Parepare dimana terdapat 3 satker lain diluar SBPJ, yaitu Pusdatin, BHKS, dan BKPU. Sebagai gambaran berikut ilustrasi organisasi dalam Kawasan BRIN Parepare:



Gambar 1 : Ilustrasi organisasi Kawasan BRIN parepare.

Sesuai dengan tujuan pembentukan BRIN yaitu menyebarkan sumber daya antara lain sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan fasilitas riset dan inovasi (Fitria, 2021), maka pelayanan BRIN khususnya satker kerja sama SBPJ Parepare dapat dilihat melalui dua perspektif, yaitu pelayanan kerja sama riset dan pelayanan kerja sama non riset yang dapat melibatkan stakeholder baik yang berasal dari lembaga internal BRIN maupun organisasi eksternal BRIN.

Kawasan BRIN Parepare yang berada di wilayah Stasiun Bumi Penginderaan Jauh (SBPJ-BRIN) Parepare menjadikan lingkup kerja sama yang berada di kantor kawasan BRIN ini lebih banyak memiliki keterkaitan antara Stasiun Bumi dengan satuan kerja daerah yang masih berada dalam satu wilayah terutama di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Hal ini menyebabkan Kawasan BRIN Parepare tidak dapat terlepas secara histories dan struktural dari SBPJ-BRIN Parepare dengan mitra di daerah maupun swasta.

Hal yang menarik pada reorganisasi ini adalah semua Satker di dalam BRIN secara umum (termasuk BRIN Parepare) mengatur dan mengurus Kerja sama masing-masing Satker

dan langsung berkoordinasi pada pejabat eselon I dan eselon II yang berkantor di BRIN Pusat (Jakarta), sehingga perlu diketahui tingkat efektivitas dan problem pelayanan terutama pada Satker di daerah.

Penelitian ini melakukan analisis terhadap pelayanan Kerja sama Kawasan BRIN Parepare terkait penerapan reformasi birokrasi termasuk efisiensi dan efektifitas program pelayanan dan kerja sama termasuk bagaimana teknologi informasi digunakan untuk kepentingan peningkatan pelayanan yang kini tengah di terapkan BRIN Parepare mengingat dinamika kebijakan terkait kerja sama di tahap awal tidak dipegang mutlak oleh satu Satker/Biro tersendiri.

### **Metode Pelaksanaan**

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Metode deskriptif sendiri merupakan metode penelitian yang memaparkan gambaran, uraian, penjelasan obyektif terkait fenomena yang terjadi dari obyek yang diteliti. Analisis data pada penelitian deskriptif dilakukan secara bertahap, diawali dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian. Sementara objek penelitian akan digambarkan dalam periode waktu terbaru. Pemecahan masalah merujuk pada periode waktu saat ini dan bjek penelitian tidak untuk generalisasi permasalahan maupun kesimpulan. Penelitian deskriptif diperuntukkan untuk memaparkan secara detail fenomena sosial dalam kurun waktu tertentu.

### **Hasil Kegiatan dan Pembahasan**

Peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu peran birokrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, agar dapat memperoleh pelayanan yang baik maka karyawan/pejabat yang bertugas bisa bertanggung jawab pada tugasnya dalam pelayanan kerja sama. Untuk menjalankan agenda reorganisasi, beberapa perubahan pada tubuh organisasi SPBJ-BRIN telah dilakukan. Perubahan ini terintegrasi dengan agenda reformasi birokrasi yang terjadi di tubuh BRIN.

Suatu perubahan menuntut arah yang jelas sehingga organisasi dapat bergerak menuju kondisi yang diharapkan oleh karena itu diperlukan tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuan perubahan terencana di satu sisi untuk memperbaiki kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan disisi lain mengupayakan perubahan perilaku karyawan (Robbins, 2015). Beberapa perubahan fundamental yang terjadi secara umum di SBPJ-BRIN yang mempengaruhi pelayanan dan proses kerja sama di kawasan BRIN Parepare antara lain :

### **Perubahan Fungsi**

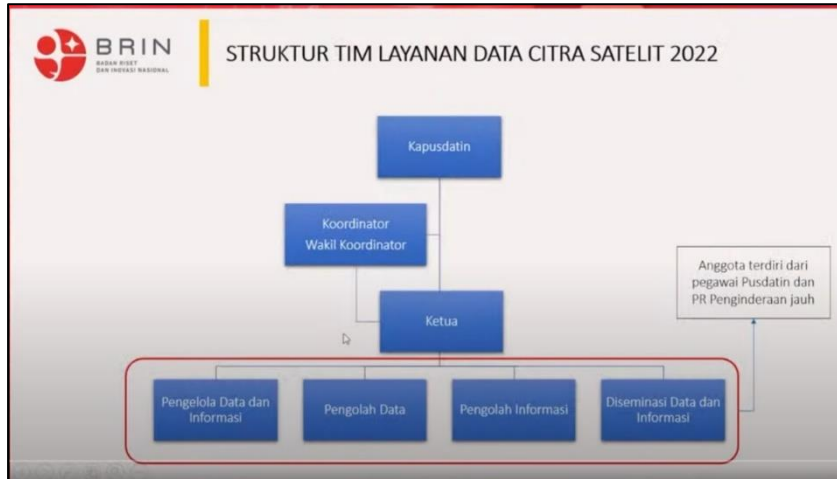
- 1) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;

- 2) Pelaksanaan penerimaan, perekaman, pengolahan data awal, dan pengelolaan data penginderaan jauh;
- 3) Pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan stasiun bumi dan peralatan lainnya;
- 4) Pelaksanaan kerja sama teknis di bidang penerimaan, perekaman, dan pengolahan data penginderaan jauh;
- 5) Pemberian layanan publik penerbangan dan antariksa;
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- 7) Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan rumah tangga;

Fungsi SBPJ Parepare mengalami perubahan seiring perubahan struktural yang dilakukan BRIN yang menarik pejabat eselon I dan eselon II kembali ke pusat dan perombakan personalia di seluruh tubuh BRIN. SBPJ sendiri saat ini sudah tidak berstatus eselon III sehingga menyebabkan 7 fungsi sebelumnya, dan kini hanya menjalankan fungsi ke 2 yaitu 'Pelaksana penerimaan, perekaman, pengolahan data awal dan pengelolaan data penginderaan jauh' dan fungsi ke 3 yaitu pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan stasiun bumi dan peralatan lainnya, selebihnya (fungsi 1, 4,5, 6 dan 7) di ambil alih eselon I dan II. Dengan demikian SBPJ Parepare hanya berfungsi sebagai pelaksana dan penyedia kebutuhan teknis penginderaan jauh, sementara lima fungsi lainnya telah dikembalikan menjadi wewenang BRIN pusat dan dijalankan oleh satuan/unit kerja yang lain.

Sementara itu fungsi 4 (kerja sama) dan 5 (layanan publik) masih dijalankan oleh SBPJ mengingat banyaknya permintaan dari masyarakat terkait kerja sama dan layanan publik baik dari pemerintah daerah, universitas maupun swasta. Meski pelayanan tetap berjalan tetapi distraksi fungsi terjadi di internal, dimana proses pelayanan dan kerja sama tertentu 'seharusnya' tidak lagi berlangsung pada kantor wilayah BRIN Parepare. Dengan kata lain, di satu sisi pimpinan menyerukan proses layanan dan kerja sama terus berjalan sekecil apapun gradasi dan bentuk layanan tersebut, namun di sisi lain ada reduksi porsi tugas fungsi SBPJ itu sendiri, sehingga mengakibatkan kebingungan alur dan proses yang sampai saat ini masih terus di sosialisasikan baik internal BRIN sendiri maupun pihak mitra luar..

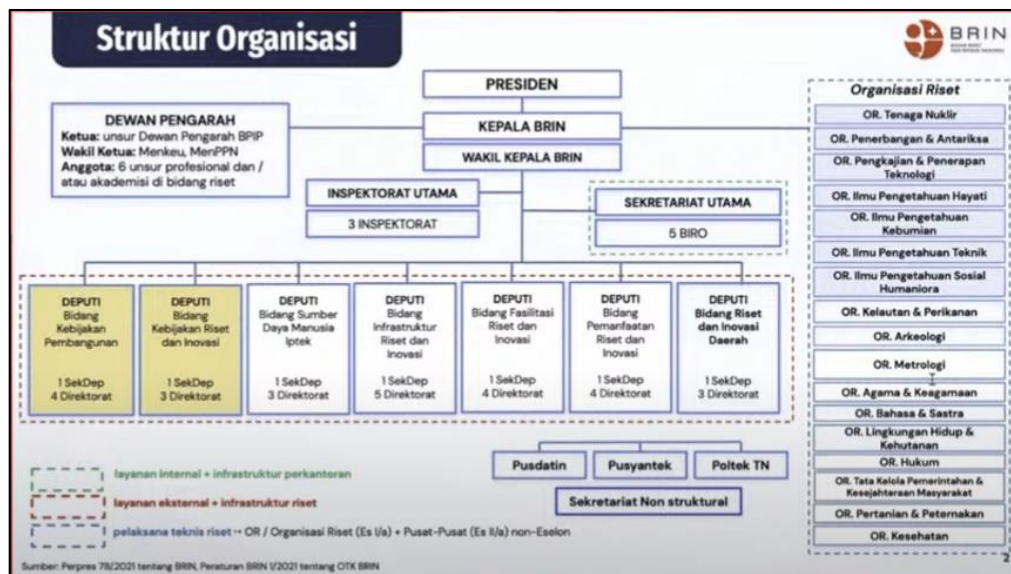
Fungsi teknis SBPJ terbatas hanya pada penyedia dan mengolah data satelit, prosesnya lebih kepada teknis bagaimana citra satelit yang ditangkap oleh stasiun bumi tersimpan dalam bentuk data mentah pada iCloud penyedia data citra/stasiun bumi. Data tersebut kemudian menjadi database, sampai disini fungsi SBPJ-BRIN Parepare selanjutnya *database* ini akan di simpan, dikelola dan dimanfaatkan oleh unit kerja lain yaitu Pusdatin yang bertanggung jawab memastikan layanan *database* tetap berjalan. Adapun permintaan data dan pengolahan data dilakukan melalui proses bisnis/kerja sama yang tangani oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) yang berada di kantor pusat BRIN di Jakarta. Untuk lebih jelas mengenai Tim Layanan Data SBPJ-BRIN Parepare dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 2: Struktur tim layanan data citra satelit SBPJ-BRIN Parepare

### Perubahan Struktural

Secara historis BRIN merupakan organisasi *hybrid* yang dibentuk dengan menggabungkan lembaga riset besar yang telah lebih dulu mapan baik secara struktural dan infrastrukturnya. Penyatuan organisasi-organisasi riset ini merupakan tantangan tersendiri bagaimana reformasi birokrasi dapat diterapkan. Perubahan tubuh organisasi riset yang bergabung di BRIN seperti LIPI, BATAN, BPPT, LAPAN mengalami perubahan transformasi (*transformation change*) atau pergeseran secara radikal dari suatu keadaan ke keadaan lainnya sehingga cukup signifikan apabila memerlukan pergeseran budaya, perilaku dan pola pikir berlanjut sepanjang waktu. Berikut gambaran struktur organisasi BRIN:



Gambar 3: Struktur organisasi BRIN

Dari gambar di atas BRIN dipimpin oleh kepala BRIN yang dibawah langsung oleh Presiden. Dibawah kepala BRIN terdapat Inspektorat Utama yang memiliki 3 Inspektorat dan



Sekretaris Utama yang memiliki 5 Biro serta, 7 Deputi. Sementara itu pelaksana teknis riset dalam hal ini ada Organisasi Riset (OR) dan Pusat Riset (PR) berada diluar struktural namun berkoordinasi langsung kepada kepala BRIN, demikian pula Pusdatin, Pusyantek, Poltek Tenaga Nuklir berada di sekretaris non struktural.

Dari gambar di atas BRIN dipimpin oleh kepala BRIN yang dibawah langsung oleh Presiden. Dibawah kepala BRIN terdapat Inspektorat Utama yang memiliki 3 Inspektorat dan Sekretaris Utama yang memiliki 5 Biro serta, 7 Deputi. Sementara itu pelaksana teknis riset dalam hal ini ada Organisasi Riset (OR) dan Pusat Riset (PR) berada diluar struktural namun berkoordinasi langsung kepada kepala BRIN, demikian pula Pusdatin, Pusyantek, Poltek Tenaga Nuklir berada di sekretaris non struktural.

Page | 81

SBPJ Parepare sendiri sesungguhnya telah melakukan pembenahan sejak tahun 2015, dimana saat itu reorganisasi dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan LAPAN mulai dari Eselon I sampai eselon IV. Perubahan struktur organisasi dimulai dengan perubahan nama Balai Penginderaan Jauh Parepare telah berubah menjadi Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare (SBPJ Parepare), fase ini dapat dinyatakan sebagai fase transisi sebelum SBPJ LAPAN bergabung di BRIN. Namun perubahan struktur organisasi yang signifikan ini sedikit mengalami perubahan tupoksi. Dan kini SBPJ-BRIN Parepare berada pada koordinasi Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains Teknologi (Eselon II, di bawah kedeputusan Bidang Infrastruktur Riset Dan Inovasi eselon I)

### Perubahan Personalia

Penerapan struktur organisasi BRIN membawa pengaruh terhadap penempatan personalia yang bertugas di SBPJ-BRIN Parepare. Pada fase transisi struktur organisasi SBPJ Parepare berubah menjadi lebih ramping. Sebelumnya SBPJ Parepare memiliki 1 eselon III yaitu Kepala SBPJ Parepare dan 4 eselon IV, yaitu 1 Kepala Subbagian Tata Usaha (KaSubBag TU) dan 3 Kepala Seksi. Setelah penerapan struktur organisasi BRIN maka di SPBJ-BRIN tidak terdapat lagi pejabat eselon I-IV. Berikut perubahan personalia SBPJ Parepare sejak tahun 2015 hingga 2021:

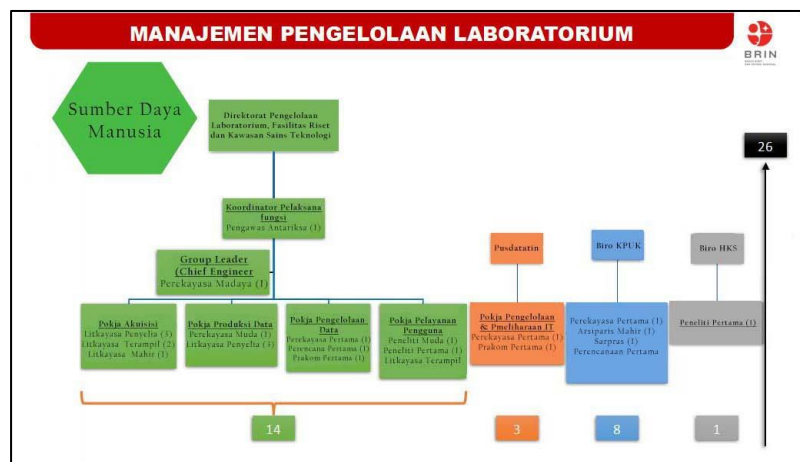
**Tabel 1: Daftar jabatan fungsional SBPJ Parepare tahun 2015-2022**

NO	Jabatan Fungsional	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Struktural	2	-	2	2	2	-	-
	Peneliti Muda	-	-	-	1	1	1	1
	Peneliti Pertama	1	1	1	1	1	2	2
	Perekayasa Ahli Madya	-	-	-	-	-	-	1
	Perekayasa Muda	-	1	2	3	3	3	1
	Perekayasa Pertama	5	7	5	3	3	3	3
	Litkayasa Pemula	2	-	-	-	-	-	-
	Litkayasa Penyelia	5	8	8	8	8	8	6
	Litkayasa Mahir	-	-	2	1	2	2	1

Litkayasa Lanjutan	4	2	-	-	-	-	-
Litkayasa Terampil	-	-	1	1	2	-	2
Litkayasa Pelaksana	2	1	-	-	-	-	-
Arsiparis Ahli Pertama	-	-	-	-	-	-	1
Arsiparis Mahir	-	-	3	3	3	-	3
Fungsional Umum	12	8	5	5	5	2	-
Perekayasa Madya	-	-	-	-	-	1	-
Analisis Pengelolaan Keuangan	-	-	-	-	-	1	1
Pranata Komputer Pertama	1	-	-	-	-	-	1
Pranata Komputer Mahir	-	-	-	1	-	-	-
Perencana Ahli Pertama	-	-	-	-	-	-	1
Pengawas Antariksa	-	-	-	-	-	-	1
Teknisi Sarpras	-	-	-	-	-	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>26</b>

Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa terdapat penambahan 3 jabatan fungsional baru yaitu Perencana Ahli Madya, Pengawas Antariksa dan Teknisi Sarana dan Prasarana (Sarpras). Jika ditarik garis waktu operasional jabatan fungsional diatas dapat dilihat bahwa jumlah personalia SBPJ Parepare setelah menjadi Kawasan BRIN Parepare (2020-2021) tampak lebih ramping dibanding sebelum bergabung di BRIN (2015-2019), tetapi tidak terdapat satupun Jabatan Fungsional yang berfungsi untuk menangani pekerjaan pada bagian pelayanan informasi dan dokumentasi

Secara keseluruhan jabatan fungsional yang terdapat di SBPJ-BRIN Parepare merupakan personalia (SDM) yang berasal dari Direktorat Pengelolaan Laboratorium dan Kawasan Sains Teknologi. Adapun penempatan jabatan fungsional dalam Manajemen Pengelolaan Laboratorium dan Kawasan Sains Teknologi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4: Struktur Manajemen Jabatan Fungsional SBPJ-BRIN Parepare



Dari gambar dapat dilihat bahwa SDM SBPJ-BRIN Parepare memiliki kordinator pelaksana fungsi yang dipegang oleh jabatan fungsional Pengawas Antariksa dan *Group Leader* yang bertugas sebagai *Chief Engineer* yang dipegang oleh jabatan fungsional Perekayasa Madya. Koordinator pelaksana ini bertugas untuk mengkoordinir empat pokja SBPJ-BRIN lainnya.

Seperti pembahasan sebelumnya dalam Kawasan BRIN Parepare yang berada di lokasi SBPJ juga sebagai tempat Biro KPUK, Biro HKS, Biro OSDM dan Pusdatin bekerja. Keempat Biro dan Pusdatin sendiri tidak memiliki hubungan fungsi dan koordinasi pada Stasiun Bumi melainkan langsung pada pejabat Eselon I dan II yang berada di kantor pusat.

### **Perubahan Proses Bisnis**

Kehadiran organisasi BRIN merupakan bentuk perubahan organisasi, dimana terdapat peralihan dalam organisasi menuju bentuk perubahan kondisi di masa depan dan penyesuaian terhadap kebutuhan yang lebih efektif. Transformasi organisasi pada umumnya akan membawa perubahan yang membutuhkan waktu dan biaya serta menimbulkan beberapa risiko dalam penyelenggaraannya. Hal ini disebabkan adanya perubahan pada organisasi juga merubah struktur organisasi, teknologi yang akan diterapkan, penataan fisik, dan sumber daya manusia. Perubahan pada lingkungan organisasi pun akan semakin kompleks dan kompetitif, dalam membentuk sikap responsif organisasi (Nurul Jannah Lailatul, 2021).

Penataan organisasi juga dimaksudkan agar arah manajerial organisasi termasuk bagaimana arus koordinasi dan informasi baik internal maupun eksternal organisasi dapat lancar, efektif dan efisien. Pada akhirnya semua perubahan tersebut ditujukan agar pelayanan publik organisasi BRIN dapat berjalan maksimal sehingga peran BRIN sebagai jembatan antara *science to science*, *science to society*, dan *science to policy* dapat terwujud.

Jika melihat kembali perubahan 7 fungsi SBPJ yang menyisakan 2 fungsi saja, maka 5 fungsi lain di ambil alih pada satuan kerja setingkat eselon I dan II, termasuk fungsi layanan. Sebelum bergabung dalam BRIN, fungsi layanan penginderaan jauh dan data satelit dikelola oleh satu unit deputi bidang penginderaan jauh (Pustekdata, Pusfatja) LAPAN. Saat ini dengan adanya BRIN maka pelayanan di SBPJ dilakukan dengan multi-unit dan ke deputian dengan tugas fungsi yang sangat spesifik serta menyesuaikan jenis layanan yang dikehendaki pengguna. Pelayanan yang diselenggarakan Kawasan BRIN Parepare lebih terfokus pada pelayanan data SBPJ yaitu layanan citra satelit dan layanan penginderaan jauh, tetapi SBPJ tidak menutup diri dengan bentuk layanan lain (kunjungan ilmiah, praktik magang, pendampingan tugas akhir, dsb) yang dapat dilakukan di SBPJ Parepare. Berikut ini gambaran ilustrasi perubahan alur pelayanan kerja sama di SBPH BRIN Parepare (BRIN Indonesia, 2022).



Gambar 5: Perubahan proses bisnis penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh

Perubahan proses bisnis merupakan salah satu agenda dalam reformasi birokrasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Saat ini proses bisnis di BRIN pada umumnya dilakukan oleh unit-unit tugas yang lebih spesifik sesuai dengan bentuk kerja sama yang akan dilakukan. Sejauh ini terdapat enam unit yang menangani pelayanan di SBPJ yaitu Pusat Riset Penginderaan jauh, Pusat data dan Informasi (Pusdatin), Pusat Pelayanan Teknik (Pusyantek), Deputi SDM IPTEK, Deputi Infrastuktur Riset dan Inovasi, Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi. Agar lebih mudah memahami pelayanan kerja sama yang menjadi pelayanan SBPJ-BRIN Parepare dapat dilihat dari dua perspektif yaitu kerja sama iptek dan non iptek.

Kerja sama iptek merupakan kategori kerja sama yang melibatkan riset antar Lembaga penelitian baik internal BRIN maupun eksternal seperti lembaga riset Universitas. Pelayanan kategori ini ditangani langsung oleh Organisasi Riset (OR) atau Pusat Riset (PR) penginderaan jauh. Seperti yang dapat dilihat pada struktur organisasi BRIN, OR/PR berada diluar struktural fungsional BRIN. Dikarenakan OR/PR penginderaan jauh tidak berada di struktur fungsional SBPJ-BRIN Parepare maka status kantor Wilayah BRIN Parepare bagi OR/PR ini adalah *Co-Working Space* (CWS). CWS sendiri merupakan istilah yang ditujukan pada suatu tempat dimana sivitas BRIN memiliki fleksibilitas untuk bisa bekerja dimana saja dalam area perkantoran kawasan BRIN diseluruh Indonesia, meski pegawai yang bersangkutan tidak memiliki persamaan fungsional ataupun tugas fungsi yang sejenis dengan tempat atau kantor dia bekerja.

Sementara pelayanan Kerja sama kategori non iptek ditangani oleh unit-unit terpisah sesuai dengan jenis kebutuhan Kerja sama, seperti (1) layanan Kerja sama permintaan data dan informasi tidak berbayar dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). (2) Pelayanan tenaga ahli penginderaan jauh seperti permintaan tenaga pengajar, narasumber, dll ditangani oleh Pusat Layanan Iptek (Pusyantek), berbeda lagi dengan (3) layanan terkait pembimbingan teknis, pelatihan, dll dilakukan di Deputi SDM Iptek (SDMI). Terkait (4) pengelolaan infrastruktur, pengadaan infrastruktur, penyewaan laboratorium, hingga kunjungan ilmiah dapat dilakukan melalui Kedeputusan Infrastruktur Riset dan Inovasi. Dan

yang terakhir (5) permintaan, pemanfaatan, kerja sama data dan informasi citra satelit dilakukan di Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi (BRIN Indonesia, 2022).

Penanganan ke enam layanan kerja sama ini tidak ditangani dan tidak berlangsung di kantor SBPJ-BRIN Parepare, melainkan langsung bersurat pada masing-masing penanggung jawab di kedeputusan masing-masing sesuai kebutuhan kerja sama yang diinginkan *stake holder*. Adapun keberadaan Deputi dalam struktur organisasi BRIN semua berada di kantor pusat.



Gambar 6: Tampilan laman Gambar 6: Tampilan laman <https://elsa.brin.go.id/>

Oleh karena SBPJ Parepare berada dibawah Dedeputusan Infrastruktur Riset dan Inovasi, dan setiap kerja sama memiliki porsi dan gradasinya masing masing maka pengajuan kerjasama yang bersifat non iptek seperti pemanfaatan infrasruktur masih dapat dilakukan dalam satu pintu melalui layanan elektronik atau e-Layanan Sains BRIN situs <https://elsa.brin.go.id/>. Pada layanan elektronik ini telah disediakan fitur-fitur layanan kerja sama sesuai kebutuhan para stake holder. Sementara layana kerja sama yang bersifat iptek, BHKS memegang peranan penting setelah satuan kerja dan calon mitra berkoordinasi dan sepakat melakukan kerja sama. Sesuai dengan Peraturan BRIN No. 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja BRIN, Biro Hukum dan Kerja Sama (BHKS) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan produk hukum lainnya, advokasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan kordinasi, dan pelaksanaan kerja sama.

Penyediaan layanan fungsi kerja sama kemudian dituangkan kedalam Peraturan BRIN No. 2 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan BRIN, oleh karena itu BHKS memiliki peran krusial dalam penyusunan kerja sama yang mana akan melakukan penelaahan dari sisi substansi kerja sama dan hukum dengan melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Kerja Sama; perumusan rancangan Naskah Kerja Sama; penelaahan rancangan Naskah Kerja Sama; dan pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama.

Dalam praktiknya, saat ini BHKS masih terus melakukan inovasi pelayanan kerja sama agar lebih efisien. Kedepan BHKS akan memberikan pelayanan kerja sama melalui Sistem Informasi Kerja Sama (SIKMA) yang dapat diakses oleh pihak yang terlibat dalam pelayanan kerja sama.



Gambar 7: Tampilan laman <https://sikma.brin.go.id/>

Sejauh ini perlu untuk digaris bawahi, bahwa proses pelayanan ini masih memungkinkan untuk berubah mengingat dinamika peralihan yang masih berjalan hingga saat ini.

### Kondisi Pelayanan Kerja Sama BRIN Parepare

Meski penerapan proses bisnis masih terbilang baru, namun tidak mengurangi minat *stake holder* untuk mengajukan kerja sama dengan SBPJ-BRIN Parepare, terlebih adanya kerja sama *stake holder* yang masih berlangsung sejak masa SBPJ belum bergabung dalam BRIN. Untuk jenis layanan kerja sama yang sudah berjalan, diperlukan pembaharuan terkait dokumen kerja sama dan pengambil alihan tugas kepada Deputi terkait. Pada kasus dimana layanan kerja sama membutuhkan dokumen kerja sama atau Nota Kesepahaman (MoU) baik pada kerja sama baru maupun yang telah berjalan selama masa transisi organisasi LAPAN ke BRIN, maka layanan ini akan ditindaklanjuti oleh Biro Hukum dan Kerja Sama (BHKS).

Biro Hukum dan Kerja Sama (BHKS) Parepare berada pada lingkup Kawasan Multi Unit Kerja Timur. Selain Parepare, Kawasan Multi Unit Kerja Timur juga membawahi Kawasan Mataram, Ambon, Bali dan Pontianak.

Dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja SBPJ-BRIN Parepare tahun 2020-2021, target pelayanan kerja sama mengalami penurunan, hal ini dapat dipahami sebagai konsekuensi transisi organisasi dimana beberapa fungsi, tugas dan wewenang SBPJ mengalami perubahan termasuk alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelayanan tersebut.

Meski jumlah target yang ditetapkan menurun namun realisasi capaian layanan sangat baik, ini menggambarkan bahwa mitra atau pihak luar masih membutuhkan pelayanan kerja

sama dengan SBPJ meski saat ini masih di masa transisi. Sampai dengan 2021 (peralihan ke BRIN) jumlah pengguna produk layanan teknologi dan data penginderaan jauh lingkup Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare yang dilayani tetap melebihi target yang di tetapkan. Tahun 2020 masih dalam pengaruh Covid-19 dari target satu Pengguna Produk dan Layanan yang berhasil di capai tujuh pengguna dengan jumlah produk data penginderaan jauh yang dihasilkan sebanyak 32.825 data dari target 25.018 data. Sementara pada tahun 2021 dari target tiga Pengguna Produk dan layanan teknologi dan data penginderaan jauh yang menjadi target SBPJ-BRIN Parepare yang tercapai adalah tujuh pengguna dengan jumlah data penginderaan jauh yang di hasilkan sebanyak 35.759 dari target 25.018 data. Berikut hasil Laporan Kerja Sama Kegiatan (LKSK) SBPJ Parepare sejak tahun 2015-2021:

Capaian Kinerja Layanan Kerja Sama Kegiatan SBPJ Parepare Periode 2015-2021							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Target</b>	4	4	5	5	3	1	3
<b>Realisasi</b>	8	11	10	11	9	7	7
	200%	275%	200%	220%	300%	700%	233%

Gambar 8: Jumlah pengguna produk dan layanan teknologi dan data penginderaan jauh SBPJ Parepare yang dilayani tahun 2015-2021

Sampai dengan September 2022, layanan produk data penginderaan jauh tetap berjalan, terdapat empat kerja sama dengan mitra daerah. Beberapa layanan yang masih berlangsung tersebut adalah pelayanan informasi daerah mengenai Pelayanan Teknis dan Diseminasi Pemanfaatan Teknologi dan Data. Beberapa daerah yang mengajukan kerja sama tersebut yaitu;

- (1) Kabupaten Boalemo Prov. Gorontalo dengan persentase kegiatan berjalan masih 70%.
- (2) Kabupaten Lombok Tengan Prov. Nusa Tenggara Barat dengan persentase kegiatan berjalan masih 50%.
- (3) BAPEDA Kota Parepare dengan persentase kegiatan masih berjalan 70%
- (4) Dan POLSEK Pelabuhan Kota Makassar dengan persentase kegiatan 100% telah berjalan.

## Simpulan dan Saran

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi untuk mengembangkan riset, inovasi dan teknologi dapat terorganisir dan terintegrasi. BRIN sendiri tidak dapat begitu saja dikatakan sebagai organisasi riset baru sebab



BRIN merupakan organisasi *hybrid* yang melebur organisasi-organisasi riset yang telah ada yaitu LIPI, BATAN, BPPT, LAPAN dan Litbang Kementerian.

Meski telah menerapkan struktur organisasi dan proses bisnis baru yang kemudian diadaptasi oleh seluruh organisasi dibawah BRIN, namun perubahan fundamental tersebut membawa *shock* dalam budaya kerja BRIN mengingat personalia yang ada di BRIN merupakan personalia yang telah terbiasa menjalankan tupoksi organisasi terdahulunya.

Page | 88

Hal ini juga berdampak pada kinerja SBPJ Parepare (ex-LAPAN) yang kini secara status beralih menjadi kantor wilayah BRIN Parepare. Adanya perubahan pada organisasi dari segi struktur, manajerial dan teknologi yang akan diterapkan pada penataan fisik, dan sumber daya manusia memberikan tantangan tersendiri untuk beradaptasi pada lingkungan kerja baru.

Salah satu perubahan yang paling signifikan terjadi pada proses bisnis atau pelayanan kerja sama dimana pelayanan pengguna produk dan teknologi dan data penginderaan jauh lingkup SBPJ-BRIN Parepare telah dipisah menjadi beberapa layanan yang ditangani oleh unit-unit berbeda dengan fungsi dan tugas yang lebih spesifik.

Dari segi kinerja lingkup kerja sama antara SBPJ BRIN dengan mitra dapat dikategorikan baik, artinya fungsi *science to society* disekitar BRIN Parepare tetap berjalan hingga saat ini sesuai dengan porsi SBPJ, namun kategori baik ini bukan tanpa kendala. Kendala muncul dari dalam, ada 2 hal yang tidak sejalan dengan capaian tersebut, yaitu distraksi tugas fungsi SBPJ Parepare, dan distraksi fungsi/fungsional pegawai. Jika tak ingin menyebutkan kekurangan SDM maka kendalanya adalah distraksi fungsi pegawai. Mau tak mau pegawai di SBPJ BRIN harus melakukan *multi task*, satu sisi pegawai harus menjalankan fungsinya masing masing, di sisi lain pelayanan publik harus terus berjalan agar *science to society* tetap pada jalurnya, sekecil apapun itu.

Mengingat dinamika dan pembenahan masih berjalan, tak dapat dipungkiri distraksi fungsi pegawai masih terjadi meski para pimpinan secara aktif melakukan sosialisasi pada internal pegawai, kebingungan internal ini tentu berimbas pada mitra eksternal BRIN. Hal tersebut terlihat dari dengan banyaknya permintaan kerja sama oleh *stake holder* dengan menggunakan alur kerja sama yang lama saat SBPJ masih menjadi bagian dari LAPAN. Di lain sisi tidak adanya pegawai yang bertugas sebagai *front line* yang berfungsi sebagai penyampai informasi awal maka tugas tersebut dijalankan secara sukarela oleh pegawai yang ada, tanpa perlu penyesuaian fungsional pegawai agar proses pelayanan kemasyarakatan tetap berjalan, hal ini diyakini memiliki nilai positif dan nilai negatif terhadap profesionalisme suatu pelayanan publik

BRIN telah melakukan kajian dan penerapan kebijakan internal sebagai bagian dari dinamika transisi, sehingga masih terlalu dini untuk menilai apakah perubahan yang dilakukan BRIN sebagai pusat integrasi penelitian berjalan efektif dan efisien, mengingat penerapan tersebut terbilang baru sehingga perlu konsistensi dan waktu serta sosialisasi yang baik pada



internal maupun masyarakat diluar lingkungan BRIN, sehingga pelayanan dapat menjadi efektif dan efisien.

Dan sebagai saran dalam tulisan ini antara lain; BRIN perlu menempatkan SDM/Pegawai sesuai kebutuhan satuan kerja. Perlunya menempatkan Fungsional Humas pada satuan kerja di daerah, terutama satuan kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Peran pranata Humas sangat penting di garda terdepan melaksanakan *science to society* dan penyebaran informasi ilmiah kepada masyarakat. Dan lebih lanjut, diperlukan kajian dari perspektif para mitra di luar lingkungan BRIN, khususnya mitra di daerah sehingga diperoleh pemahaman yang lebih konkrit terhadap evaluasi dan kebijakan yang akan diterapkan nantinya terhadap pelayanan dan kerja sama.

#### Daftar Pustaka

- BRIN Indonesia. (2022). *Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit Penginderaan Jauh Tahun 2022*. Brin Indonesia. <https://www.youtube.com/watch?v=PnC6HGAHCWw&t=3016s>
- Fitria, N. J. L. (2021). Pembentukan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Sebagai Upaya Menuju Good Governance Dengan Prinsip Reformasi Birokrasi. *Wacana Publik*, 15(02), 105. <https://doi.org/10.37295/wp.v15i2.62>
- Fitrianingrum, L., Lusyana, D., & Lellyana, D. (2020). Analisis Pengaruh Penataan Organisasi Lipi Terhadap Kebahagiaan Asn Pendukung Iptek Di Lingkungan Lipi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(2), 291–305. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.611>
- Habibi, F. (2020). Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal Borneo Admistrator*, 16(2).
- Inspektorat Utama Kemenristek / BRIN. (2020). *Road-Map-Reformasi-Birokrasi-2020-2024-3.pdf*.
- Robbins, S. P. (2015). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- SBPJ BRIN. (2022). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SBPJ BRIN Parepare 2021*.